

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Parepare mendapatkan Bantuan Keuangan dari Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka optimalisasi pencapaian visi misi Gubernur Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sudah tidak sesuai dengan belanja pegawai di beberapa lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu untuk diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 161);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2025 Nomor 6);
9. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2025 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp985.316.093.781,00 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus enam belas juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga Penjabaran perubahan APBD setelah penyesuaian menjadi sebesar Rp990.316.093.781,00 (sembilan ratus sembilan puluh miliar tiga ratus enam belas juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang bersumber dari pendapatan transfer.

2. Ketentuan

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp647.681.690.550,30 (enam ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah tiga puluh sen) bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga Penjabaran perubahan APBD setelah penyesuaian menjadi sebesar Rp652.681.690.550,30 (enam ratus lima puluh dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah tiga puluh sen) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp591.821.249.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp55.860.441.550,30 (lima puluh lima miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah tiga puluh sen) bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga Penjabaran perubahan APBD setelah penyesuaian menjadi sebesar Rp60.860.441.550,30 (enam puluh miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah tiga puluh sen).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah pada penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, semula sebesar Rp982.050.093.781,00 (sembilan ratus delapan puluh dua miliar lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah penyesuaian menjadi sebesar Rp987.050.093.781,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) digunakan untuk membiayai:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;

c. belanja

- c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp877.521.336.324,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga jumlah anggaran belanja operasi setelah penyesuaian menjadi sebesar Rp878.021.336.324,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan miliar dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp415.827.517.201,00 (empat ratus lima belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp455.555.883.751,00 (empat ratus lima puluh lima miliar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah penyesuaian menjadi sebesar Rp456.055.883.751,00 (empat ratus lima puluh enam miliar lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.887.935.372,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

5. Ketentuan

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp94.528.757.457,00 (sembilan puluh empat miliar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) sehingga jumlah anggaran belanja modal setelah penyesuaian menjadi sebesar Rp99.028.757.457,00 (sembilan puluh sembilan miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
 - (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.688.000.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp43.273.519.628,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp23.442.686.624,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) sehingga jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah penyesuaian menjadi sebesar Rp27.942.686.624,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp23.294.985.805,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.829.565.400,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah).
6. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

7. Ketentuan

7. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 18 November 2025
WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 18 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

AMARUN AGUNG HAMKA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR : 38 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KOTA PAREPARE
 RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA,
 DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor Urut	Uraian	APBD PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5=4-3	6=5:3
4	PENDAPATAN DAERAH	959.850.285.477,30	964.850.285.477,30	5.000.000.000,00	0,52
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	312.168.594.927,00	312.168.594.927,00	-	-
4.1.1	Pajak Daerah	72.627.258.687,00	72.627.258.687,00	-	-
4.1.2	Retribusi Daerah	8.844.028.420,00	8.844.028.420,00	-	-
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.483.311.820,00	9.483.311.820,00	-	-
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	221.213.996.000,00	221.213.996.000,00	-	-
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	647.681.690.550,30	652.681.690.550,30	5.000.000.000,00	0,77
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	591.821.249.000,00	591.821.249.000,00	-	-
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55.860.441.550,30	60.860.441.550,30	5.000.000.000,00	8,95
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-

Lain-lain Pendapatan

4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	959.850.285.477,30	964.850.285.477,30	5.000.000.000,00	0,52
5.	BELANJA	982.050.093.781,00	987.050.093.781,00	5.000.000.000,00	0,51
5.1.	BELANJA OPERASI	877.521.336.324,00	878.021.336.324,00	500.000.000,00	0,06
5.1.1	Belanja Pegawai	415.827.517.201,00	415.827.517.201,00	-	-
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	455.555.883.751,00	456.055.883.751,00	500.000.000,00	0,11
5.1.3	Belanja Bunga	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-
5.1.4	Belanja Hibah	5.887.935.372,00	5.887.935.372,00	-	-
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
5.2.	BELANJA MODAL	94.528.757.457,00	99.028.757.457,00	4.500.000.000,00	4,76
5.2.1	Belanja Modal Tanah	2.688.000.000,00	2.688.000.000,00	-	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.273.519.628,00	43.273.519.628,00	-	-
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.442.686.624,00	27.942.686.624,00	4.500.000.000,00	19,20
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	23.294.985.805,00	23.294.985.805,00	-	-
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.829.565.400,00	1.829.565.400,00	-	-
				-	-
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-
5.4.	BELANJA TRANSFER			-	-
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil			-	-
	Jumlah Belanja	982.050.093.781,00	987.050.093.781,00	5.000.000.000,00	0,51
	Total Surplus/(Defisit)	(22.199.808.303,70)	(22.199.808.303,70)	-	-
6	PEMBIAYAAN	22.199.808.303,70	22.199.808.303,70	-	-
6,1	Penerimaan Pembiayaan	25.465.808.303,70	25.465.808.303,70	-	-
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25.465.808.303,70	25.465.808.303,70	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	25.465.808.303,70	25.465.808.303,70	-	-

Pengeluaran Pembiayaan

6.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.266.000.000,00	3.266.000.000,00	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-
				-	-
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok utang yang Jatuh Tempo	3.266.000.000,00	3.266.000.000,00	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.266.000.000,00	3.266.000.000,00	-	-
	Pembiayaan Neto	22.199.808.303,70	22.199.808.303,70	-	-
6.3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	-	-

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR : 38 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KOTA PARE PARE
 PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
 BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN

Kode Rekening													Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Penjelasan	Dasar Hukum
													BIDANG KESEHATAN	32.639.270.126	32.639.270.126	-		
		1.02.0.00.0.00.02.0000	0										DINAS KESEHATAN	32.639.270.126	32.639.270.126	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	0	0								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.639.270.126	32.639.270.126	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	00								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.639.270.126	32.639.270.126	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	02:02	01								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.639.270.126	32.639.270.126	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	02:02	01	5	1						BELANJA OPERASI	32.639.270.126	32.639.270.126	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	02:02	01	5	1	01					Belanja Pegawai	32.639.270.126	32.639.270.126	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01				Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	30.844.485.506	31.144.485.506	300.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	01			Belanja Gaji Pokok ASN	22.840.365.994	23.340.365.994	500.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	01	0001		Belanja Gaji Pokok PNS	21.197.204.751	21.197.204.751	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	01	0002		Belanja Gaji Pokok PPPK	1.643.161.243	2.143.161.243	500.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	02			Belanja Tunjangan Keluarga ASN	2.248.204.993	2.248.204.993	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	02	0001		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.719.066.700	1.719.066.700	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	02	0001		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	529.138.293	529.138.293	-		

Belanja Tunjangan

Kode Rekening												Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Penjelasan	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN	121.792.100	121.792.100	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	121.792.100	121.792.100	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	04		Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.207.621.717	3.207.621.717	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	04	0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.207.621.717	3.207.621.717	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	239.854.500	239.854.500	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	115.534.500	115.534.500	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	05	0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	124.320.000	124.320.000	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	06		Belanja Tunjangan Beras ASN	1.382.869.433	1.382.869.433	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	992.369.500	992.369.500	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	06	0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	390.499.933	390.499.933	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	803.254.733	603.254.733	(200.000.000)		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	688.115.898	488.115.898	(200.000.000)		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	07	0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	115.138.835	115.138.835	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN	522.036	522.036	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	397.400	397.400	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	08	0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	124.636	124.636	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	02			Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.794.784.620	1.494.784.620	(300.000.000)		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	02	01		Tambahan Penghasilan Beban Kerja ASN	1.794.784.620	1.494.784.620	(300.000.000)		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	02	01	0001	Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS	1.794.784.620	1.494.784.620	(300.000.000)		
Jumlah												32.639.270.126	32.639.270.126	-			

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

KOTA PARE PARE

PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0009 Rumah Sakit dr.Hasri Ainun Habibie

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Penjelasan	Dasar Hukum
1	02										URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	7.522.959.102	7.522.959.102	-		
1	02	01									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.522.959.102	7.522.959.102	-		
1	02	01	2.02								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.522.959.102	7.522.959.102	-		
1	02	01	2.02	01							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.522.959.102	7.522.959.102	-		
1	02	01	2.02	01	5	1					BELANJA OPERASI	7.522.959.102	7.522.959.102	-		
1	02	01	2.02	01	5	1	01				Belanja Pegawai	7.522.959.102	7.522.959.102	-		
1	02	01	2.02	01	5	1	01	01			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.967.959.102	6.972.959.102	5.000.000,00		
1	02	01	2.02	01	5	1	01	01	01		Belanja Gaji Pokok ASN	5.336.719.460	5.382.126.204	45.406.744,00		
1	02	01	2.02	01	5	1	01	01	01	0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.407.045.860	4.453.602.604	46.556.744,00		
1	02	01	2.02	01	5	1	01	01	01	0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	929.673.600	928.523.600	(1.150.000,00)		
1	02	01	2.02	01	5	1	01	01	02		Belanja tunjangan keluarga ASN	472.836.586	476.244.980	3.408.394,00		
1	02	01	2.02	01	5	1	01	01	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	383.258.890	385.414.862	2.155.972,00		
1	02	01	2.02	01	5	1	01	01	02	0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	89.577.696	90.830.118	1.252.422,00		
1	02	01	2.02	01	5	1	01	01	03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN	145.950.000	146.350.000	400.000,00		

Belanja Tunjangan

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Penjelasan	Dasar Hukum
1	02	01	2.02	01	5	1	01	01	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	145.950.000	146.350.000	400.000,00		
1	02	01	2.02	01	5	1	01	01	04		Belanja Tunjangan Fungsional ASN	630.376.000	586.453.588	(43.922.412,00)		
1	02	01	2.02	01	5	1	01	01	04	0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	630.376.000	586.453.588	(43.922.412,00)		
1	02	01	2.02	01	5	1	01	01	05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.205.000	32.805.000	1.600.000,00		
1	02	01	2.02	01	5	1	01	01	05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.205.000	32.805.000	1.600.000,00		
1	02	01	2.02	01	5	1	01	01	06		Belanja Tunjangan Beras ASN	282.872.520	281.399.920	(1.472.600,00)		
1	02	01	2.02	01	5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	218.635.980	211.142.200	(7.493.780,00)		
1	02	01	2.02	01	5	1	01	01	06	0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	64.236.540	70.257.720	6.021.180,00		
1	02	01	2.02	01	5	1	01	01	07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	67.815.880	67.395.754	(420.126,00)		
1	02	01	2.02	01	5	1	01	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	64.852.468	64.432.342	(420.126,00)		
1	02	01	2.02	01	5	1	01	01	07	0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.963.412	2.963.412	-		
1	02	01	2.02	01	5	1	01	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN	183.656	183.656	-		
1	02	01	2.02	01	5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	111.600	111.600	-		
1	02	01	2.02	01	5	1	01	01	08	0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	72.056	72.056	-		
1	02	01	2.02	01	5	1	01	02			Belanja Tambahan Penghasilan ASN	555.000.000	550.000.000	(5.000.000,00)		
1	02	01	2.02	01	5	1	01	02	06		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	555.000.000	550.000.000	(5.000.000,00)		
1	02	01	2.02	01	5	1	01	02	06	0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	555.000.000	550.000.000	(5.000.000,00)		
Jumlah											7.522.959.102	7.522.959.102	-			

1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA PARE PARE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang Urusan : 1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Penjelasan	Dasar Hukum
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	31.973.326.556,00	36.473.326.556,00	4.500.000.000,00		
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.780.221.549,00	7.280.221.549,00	4.500.000.000,00		
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2.780.221.549,00	7.280.221.549,00	4.500.000.000,00		
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2.780.221.549,00	7.280.221.549,00	4.500.000.000,00		
5.2	BELANJA MODAL	2.780.221.549,00	7.280.221.549,00	4.500.000.000,00		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.780.221.549,00	7.280.221.549,00	4.500.000.000,00		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.780.221.549,00	7.280.221.549,00	4.500.000.000,00		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.780.221.549,00	7.280.221.549,00	4.500.000.000,00		
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	9.945.600,00	4.509.945.600,00	4.500.000.000,00		
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.770.275.949,00	2.770.275.949,00	-		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.200.000,00	11.200.000,00	-		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.200.000,00	11.200.000,00	-		
	Jumlah Total	31.973.326.556,00	36.473.326.556,00	4.500.000.000,00		

2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

KOTA PARE PARE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN
OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : 2.07.2.17.0.00.10.0000 DINAS TENAGA KERJA

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan Jumlah (Rp.)	Setelah Perubahan Jumlah (Rp.)	Bertambah / Berkurang	Keterangan
2	17	7								URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH	1.831.238.000	2.331.238.000	500.000.000	
2	17	07	2	01						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	1.831.238.000	2.331.238.000	500.000.000	
2	17	07	2	01						Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	1.831.238.000	2.331.238.000	500.000.000	
2	17	07	2	01	0004					Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.831.238.000	2.331.238.000	500.000.000	
						5	1			BELANJA OPERASI	1.831.238.000	2.331.238.000	500.000.000	
						5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.831.238.000	2.331.238.000	500.000.000	
						5	1	02	01	Belanja Barang	1.602.384.000	2.102.384.000	500.000.000	
						5	1	02	01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.602.384.000	2.102.384.000	500.000.000	
						5	1	02	01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	38.076.500	38.568.000	491.500	Bertambah dari Admin Kegiatan Banprov
						5	1	02	01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	750.000	930.000	180.000	Bertambah dari Admin Kegiatan Banprov
						5	1	02	01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan cetak	15.319.500	15.975.000	655.500	Bertambah dari Admin Kegiatan Banprov
						5	1	02	01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	13.956.000	13.956.000	-	
						5	1	02	01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	819.000	1.092.000	273.000	Bertambah dari Admin Kegiatan Banprov
						5	1	02	01 01 0039	Belanja Barang untuk Dijual/ Diserahkan Kepada Masyarakat	1.441.293.000	1.939.693.000	498.400.000	Bertambah dari Kegiatan Banprov
						5	1	02	01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	92.170.000	92.170.000	-	

Belanja Jasa

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan Jumlah (Rp.)	Setelah Perubahan Jumlah (Rp.)	Bertambah / Berkurang	Keterangan		
						5	1	02	02		Belanja Jasa	228.854.000	228.854.000			
						5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	228.854.000	228.854.000			
						5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	142.800.000	142.800.000	-	
						5	1	02	02	01	0008	Honorarium Penyuluhan atau Pendamping	4.200.000	4.200.000	-	
						5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44.354.000	44.354.000	-	
						5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	37.500.000	37.500.000	-	
Jumlah											1.831.238.000	2.331.238.000	500.000.000			

2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA PARE PARE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Organisasi : 2.14.0.00.0.00.15.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening														Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Penjelasan	Dasar Hukum	
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000												DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (TOTAL PAGU SKPD)	5.341.135.378,00	5.341.135.378,00	-			
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.824.906.941,00	1.824.906.941,00	-			
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02							ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.824.906.941,00	1.824.906.941,00	-			
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.824.906.941,00	1.824.906.941,00	-			
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1				BELANJA OPERASI	1.824.906.941,00	1.824.906.941,00	-			
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1	01			Belanja Pegawai	1.824.906.941,00	1.824.906.941,00	-			
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.419.661.772,00	1.419.661.772,00	-			
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.131.178.306,00	1.131.178.306,00	-	Penyesuaian besaran Belanja Tunjangan Keluarga, Belanja Tunjangan Beras dan Belanja Pembulatan		
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1	01	01	01	0001	Belanja Gaji Pokok PNS	981.178.306,00	981.178.306,00	-		
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1	01	01	01	0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	150.000.000,00	150.000.000,00	-		
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1	01	01	02		Belanja Tunjangan Keluarga ASN	105.206.521,00	105.206.521,00	-		
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1	01	01	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	84.206.521,00	92.577.933,00	8.371.412,00		
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1	01	01	02	0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	21.000.000,00	12.628.588,00	(8.371.412,00)		

Belanja Tunjangan

Kode Rekening														Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Penjelasan	Dasar Hukum	
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1	01	01	03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN	83.150.000,00	83.150.000,00	-		
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1	01	01	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	83.150.000,00	83.150.000,00	-		
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1	01	01	04		Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2.478.000,00	2.478.000,00	-		
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1	01	01	04	0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.478.000,00	2.478.000,00	-		
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1	01	01	05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	27.345.000,00	27.345.000,00	-		
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1	01	01	05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	27.345.000,00	27.345.000,00	-		
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1	01	01	06		Belanja Tunjangan Beras ASN	58.948.800,00	58.948.800,00	-		
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	46.348.800,00	49.823.880,00	3.475.080,00		
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1	01	01	06	0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12.600.000,00	9.124.920,00	(3.475.080,00)		
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1	01	01	07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.338.286,00	11.338.286,00	-		
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1	01	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.338.286,00	11.338.286,00	-		
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1	01	01	07	0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	-	-	-		
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1	01	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN	16.859,00	16.859,00	-		
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.859,00	13.859,00	3.000,00		
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1	01	01	08	0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.000,00	3.000,00	(3.000,000)		
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1	01	02			Belanja Tambahan Penghasilan ASN	405.245.169,00	405.245.169,00	-		
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1	01	02	01		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	405.245.169,00	405.245.169,00	-		
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2	14	01	2	02	0001	5	1	01	02	01	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	405.245.169,00	405.245.169,00	-		
JUMLAH															1.824.906.941,00	1.824.906.941,00	-			

KOTA PARE PARE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 5.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.27.0000 - BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening											Uraian	sebelum perubahan	setelah perubahan	Bertambah / Berkurang	Keterangan				
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000										BADAN KEUANGAN DAERAH	54.590.660.441,00	54.590.660.441,00	0,00				
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.593.056.741,00	39.593.056.741,00	0,00				
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.262.410.131,00	30.262.410.131,00	0,00				
			5	02	01	2	02	0001				Penyediaan Gaji dan Tunjangan	30.260.520.131,00	30.260.520.131,00	0,00				
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5			BELANJA DAERAH	30.260.520.131,00	30.260.520.131,00	0,00				
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1		BELANJA OPERASI	30.260.520.131,00	30.260.520.131,00	0,00				
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	Belanja Pegawai	30.260.520.131,00	30.260.520.131,00	0,00				
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	23.573.558.080,00	23.573.558.080,00	0,00			
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.303.352.466,00	5.303.352.466,00	0,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	01	0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.929.810.486,00	3.929.810.486,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	01	0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.373.541.980,00	1.373.541.980,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	02		Belanja Tunjangan Keluarga ASN	549.882.877,00	549.882.877,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	357.587.000,00	357.587.000,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	02	0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	192.295.877,00	192.295.877,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN	265.734.900,00	265.734.900,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	265.734.900,00	265.734.900,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	04		Belanja Tunjangan Fungsional ASN	46.517.000,00	46.517.000,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	04	0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	46.517.000,00	46.517.000,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	04	0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0,00	0,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	105.716.700,00	105.716.700,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	105.716.700,00	105.716.700,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	06		Belanja Tunjangan Beras ASN	328.215.875,00	328.215.875,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	193.149.600,00	193.149.600,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	06	0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	135.066.275,00	135.066.275,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	36.637.562,00	36.637.562,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	35.774.000,00	35.774.000,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	07	0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	863.562,00	863.562,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.153.394,00	1.153.394,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	953.594,00	953.594,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	08	0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	199.800,00	199.800,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	09		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.427.316.366,00	14.427.316.366,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	09	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	13.239.951.229,00	12.825.751.229,00	(414.200.000,00)	

Belanja Iuran

Kode Rekening												Uraian	sebelum perubahan	setelah perubahan	Bertambah / Berkurang	Keterangan			
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	09	0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.187.365.137,00	1.601.565.137,00	414.200.000,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	10		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	630.660.585,00	630.660.585,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	10	0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	553.195.920,00	553.195.920,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	10	0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	77.464.665,00	77.464.665,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	11		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.878.370.355,00	1.878.370.355,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	11	0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.652.413.699,00	1.652.413.699,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	01	11	0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	225.956.656,00	225.956.656,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02			Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.613.489.799,00	6.613.489.799,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	01		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.539.925.442,00	2.539.925.442,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001		1	01	02	01	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.539.925.442,00	2.539.925.442,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.073.564.357,00	4.073.564.357,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	130.742.265,00	130.742.265,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	750.000,00	750.000,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.323.673.204,00	1.323.673.204,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	868.463.614,00	868.463.614,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	496.733.853,00	496.733.853,00	0,00	

Belanja Insentif

Kode Rekening													Uraian	sebelum perubahan	setelah perubahan	Bertambah / Berkurang	Keterangan		
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	6.775.000,00	6.775.000,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	81.487.860,00	81.487.860,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	3.318.000,00	3.318.000,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0034	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	55.965.910,00	55.965.910,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0037	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	

Belanja Insentif

Kode Rekening													Uraian	sebelum perubahan	setelah perubahan	Bertambah / Berkurang	Keterangan		
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal	0,00	0,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0040	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0042	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	33.452.651,00	33.452.651,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0047	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	86.077.000,00	86.077.000,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	02	06	0063	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	04			Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	66.247.132,00	66.247.132,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	04	12		Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	66.247.132,00	66.247.132,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001						0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	60.856.348,00	60.856.348,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001						0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.347.696,00	1.347.696,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001						0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.043.088,00	4.043.088,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001	5	1	01	04			Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	7.225.120,00	7.225.120,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001					07		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.700.960,00	6.700.960,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001					07	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.700.960,00	6.700.960,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001					08		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00	131.040,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001						0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00	131.040,00	0,00	

Belanja Iuran

Kode Rekening											Uraian	sebelum perubahan	setelah perubahan	Bertambah / Berkurang	Keterangan	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001		09		Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00	393.120,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0001			0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00	393.120,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0003				Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguujian/VerifikasiKeuangan SKPD	0,00	0,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0004				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	630.000,00	630.000,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0005				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD	630.000,00	630.000,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	02	01	2	02	0007				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	630.000,00	630.000,00	0,00	
JUMLAH											30.262.410.131,00	30.262.410.131,00	0,00			

2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAMRAGA

KOTA PARE PARE
 PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK
 PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 Organisasi : 2.19.3.26.0.00.20.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode Rekening													Uraian	DPPA 2025	Parsial gaji	Bertambah /Berkurang	Penjelasan	Dasar Hukum		
2	19	2.26.0.00.20.0000												DINAS KEPEMUDAAN	3.637.718.618,00	3.637.718.618,00	-			
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.637.718.618,00	3.637.718.618,00	-			
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02							ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.637.718.618,00	3.637.718.618,00	-			
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02	0001						Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS						
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02	0001	5	1	01			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.191.972.025,00	2.145.555.711,00	46.416.314,00			
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02	0001	5	1	01	01	01	0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.081.626.825,00	2.035.210.511,00	- 46.416.314,00		
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02	0001	5	1	01	01	01	0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	110.345.200,00	110.345.200,00	-		
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02	0001	5	1	01	01	02		Belanja Tunjangan Keluarga ASN	187.317.174,00	212.137.988,00	24.820.814,00		
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02	0001	5	1	01	01	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	171.868.846,00	196.689.660,00	24.820.814,00		
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02	0001	5	1	01	01	02	0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	15.448.328,00	15.448.328,00	-		
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02	0001	5	1	01	01	03		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	131.368.750,00	131.368.750,00	-		
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02	0001	5	1	01	01	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	131.368.750,00	131.368.750,00	-		
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02	0001	5	1	01	01	04		Belanja Tunjangan Fungsional ASN	112.722.750,00	130.818.250,00	18.095.500,00		
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02	0001	5	1	01	01	04	0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	109.539.750,00	127.635.250,00	18.095.500,00		
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02	0001	5	1	01	01	04	0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.183.000,00	3.183.000,00	-		
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02	0001	5	1	01	01	05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	45.127.000,00	48.627.000,00	3.500.000,00		
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02	0001	5	1	01	01	05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	45.127.000,00	48.627.000,00	3.500.000,00		

Belanja Tunjangan

Kode Rekening													Uraian	DPPA 2025	Parsial gaji	Bertambah /Berkurang	Penjelasan	Dasar Hukum		
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02	0001	5	1	01	01	06		Belanja Tunjangan Beras ASN	109.114.070,00	109.114.070,00	-		
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02	0001	5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	103.596.810,00	103.596.810,00	-		
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02	0001	5	1	01	01	06	0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.517.260,00	5.517.260,00	-		
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02	0001	5	1	01	01	07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	25.064.621,00	25.064.621,00	-		
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02	0001	5	1	01	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.547.361,00	19.547.361,00	-		
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02	0001	5	1	01	01	07	0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	5.517.260,00	5.517.260,00	-		
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02	0001	5	1	01	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN	32.228,00	32.228,00	-		
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02	0001	5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.976,00	26.976,00	-		
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02	0001	5	1	01	01	08	0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.252,00	5.252,00	-		
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02	0001	5	1	01	02			Belanja Tambahan Penghasilan ASN			-		
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02	0001	5	1	01	02	01		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	835.000.000,00	835.000.000,00	-		
2	19	2.26.0.00.20.0000	2	19	01	2	02	0001	5	1	01	02	01	0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	835.000.000,00	835.000.000,00	-		
JUMLAH														3.637.718.618,00	3.637.718.618,00	-				

3.27.3.25 - BIDANG PERIKANAN DAN BIDANG PERTANIAN

KOTA PARE PARE

PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK,
SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urausan Pemerintah : 3.27.3.25 BIDANG PERIKANAN DAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.3.25.0.00.22. DINAS PERTANIAN, KELAURAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Penjelasan	Dasar Hukum
0	00	3.25.0.00.22.000	00	0.00	00	5					BELANJA	9.780.899.418,00	9.780.899.418,00	-		
3	27	3.25.0.00.22.000	01	0.00	0000						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.975.891.018,00	7.975.891.018,00	-		
3	27	3.25.0.00.22.000	01	2.02	0000						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.884.906.988,00	6.884.906.988,00	-		
3	25	3.25.0.00.22.000	01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.802.108.988,00	6.802.108.988,00	-		
3	25	3.25.0.00.22.000	01	2.02	01	5	1				- BELANJA OPERASI	6.802.108.988,00	6.802.108.988,00	-		
3	25	3.25.0.00.22.000	01	2.02	01	5	1	01			- Belanja Pegawai	6.802.108.988,00	6.802.108.988,00	-		
3	25	3.25.0.00.22.000	01	2.02	01	5	1	01	01		- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.285.001.837,00	5.285.001.837,00	-		
3	25	3.25.0.00.22.000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	- Belanja Gaji Pokok ASN	4.067.561.784,00	4.067.555.922,00	(5.862,00)		
3	25	3.25.0.00.22.000	01	2.02	01	5	1	01	01	01 0001	- Belanja Gaji Pokok PNS	3.446.451.484,00	3.446.445.622,00	(5.862,00)		
3	25	3.25.0.00.22.000	01	2.02	01	5	1	01	01	08	- Belanja Pembulatan Gaji ASN	48.269,00	54.131,00	5.862,00		
3	25	3.25.0.00.22.000	01	2.02	01	5	1	01	01	08 0001	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	43.700,00	47.700,00	4.000,00		
3	25	3.25.0.00.22.000	01	2.02	01	5	1	01	01	08 0002	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.569,00	6.431,00	1.862,00		
Jumlah											9.780.899.418,00	9.780.899.418,00	-			

7.01 - URUSAN PEMERINTAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BACUKIKI

KOTA PARE PARE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang Urusan : 7.01 - URUSAN PEMERINTAN UNSUR KEWILAYAHAN BACUKIKI
Organisasi : 7.01.0.0.00.0.00.29.0000 - KECAMATAN
Unit Organisasi : 7.01.0.0.00.0.00.29.0000 - KECAMATAN BACUKIKI

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Penjelasan	Dasar Hukum
7.01.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.627.747.147	4.627.747.147	-		
7.01.29.01.2.02	Administrasi Keuangan Pearngakt Daerah	4.627.747.147	4.627.747.147	-		
7.01.29.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.627.747.147	4.627.747.147	-		
5.1	BELANJA OPERASI	4.627.747.147	4.627.747.147	-		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.627.747.147	4.627.747.147	-		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.674.638.693	3.674.638.693	-		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.925.523.072	2.856.969.162	(68.553.910)		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.403.342.993	2.566.685.793	163.342.800		
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	522.180.079	290.283.369	(231.896.710)		
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	316.733.192	357.606.102	40.872.910		

Belanja Tunjangan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Penjelasan	Dasar Hukum
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	231.024.352	271.897.262	40.872.910		
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	85.708.840	85.708.840	-		
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	193.240.000	199.040.000	5.800.000		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	193.240.000	199.040.000	5.800.000		
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	38.335.000	38.335.000	-		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	38.335.000	38.335.000	-		
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	181.122.420	202.648.420	21.526.000		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	120.289.620	141.815.620	21.526.000		
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	60.832.800	60.832.800	-		
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.632.473	18.987.473	355.000		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.632.473	18.987.473	355.000		
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.052.536	1.052.536	-		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.026.536	1.026.536	-		
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	26.000	26.000	-		
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	953.108.454	953.108.454	-		

Tambahan Penghasilan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Penjelasan	Dasar Hukum
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	953.108.454	953.108.454	-		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	953.108.454	953.108.454	-		
Jumlah Total		4.627.747.147	4.627.747.147	-		

7.01 - URUSAN PEMERINTAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN UJUNG

KOTA PARE PARE
 PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK
 PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 7.01 - UNSUR KEWILAYAHAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0000 - KECAMATAN UJUNG

Kode Rekening												Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Penjelasan	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000										PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	07	01.01	2.02	0001						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	07	01.01	2.02	0001	5	1				BELANJA OPERASI	4.900.985.345	4.900.985.345			
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	07	01.01	2.02	0001	5	1	01			Belanja Pegawai	4.900.985.345	4.900.985.345			
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	07	01.01	2.02	0001	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.900.985.345	4.900.985.345			
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	07	01.01	2.02	0001	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.070.200.000	3.093.191.995			
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	07	01.01	2.02	0001	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok PNS	2.496.837.400	2.878.537.400	381.700.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	07	01.01	2.02	0001	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok PPPK	573.362.600	214.654.595	(358.708.005)		
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	07	01.01	2.02	0001	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	346.944.916	346.944.916	-		
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	07	01.01	2.02	0001	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	266.750.732	316.750.732	50.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	07	01.01	2.02	0001	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	80.194.184	30.194.184	(50.000.000)		
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	07	01.01	2.02	0001	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	246.720.000	246.720.000			
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	07	01.01	2.02	0001	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	246.720.000	246.720.000	-		
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	07	01.01	2.02	0001	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	79.082.484	79.082.484	-		
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	07	01.01	2.02	0001	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	42.087.484	62.087.484	20.000.000		

Belanja Tunjangan

Kode Rekening													Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Penjelasan	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	07	01.01	2.02	0001	5	1	01	01	05	0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	36.995.000	16.995.000	(20.000.000)		
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	07	01.01	2.02	0001	5	1	01	01	06		Belanja Tunjangan Beras ASN	168.851.940	168.851.940	-		
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	07	01.01	2.02	0001	5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	140.211.160	150.211.160	10.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	07	01.01	2.02	0001	5	1	01	01	06	0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	28.640.780	18.640.780	(10.000.000)		
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	07	01.01	2.02	0001	5	1	01	01	07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	57.836.863	34.744.868	(23.091.995)		
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	07	01.01	2.02	0001	5	1	01	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	17.465.583	34.744.868	17.279.285		
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	07	01.01	2.02	0001	5	1	01	01	07	0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	40.371.280	-	(40.371.280)		
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	07	01.01	2.02	0001	5	1	01	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN	88.704	188.704	100.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	07	01.01	2.02	0001	5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	34.704	134.704	100.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	07	01.01	2.02	0001	5	1	01	01	08	0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	54.000	54.000	-		
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	07	01.01	2.02	0001	5	1	01	02	01		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	931.260.438	931.260.438	-		
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	07	01.01	2.02	0001	5	1	01	02	01	0001	Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan beban Kerja	931.260.438	931.260.438	-		
JUMLAH													4.900.985.345,00	4.900.985.345,00	-			

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURWANA